

Abstrak

Pembangunan infrastruktur secara masif sedang gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kebutuhan akan lahan untuk berbagai proyek infrastruktur tersebut meningkat bersamaan dengan sederet permasalahan yang mengikutinya. Sengketa kepemilikan lahan, penolakan masyarakat akan rencana pembangunan, hingga pembangunan yang melewati kawasan konservasi menjadi beberapa permasalahan yang kerap terjadi dalam kendala persiapan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum kawasan konservasi atas pengadaan tanah bagi pembangunan bagi kepentingan umum? dan bagaimana mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya di atas kawasan konservasi? Penelitian hukum ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis dan yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Pembangunan kepentingan umum dapat dilakukan secara terbatas dengan izin pinjam pakai apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan serta memenuhi unsur kegiatan strategis sesuai yang diatur dalam undang-undang, serta melakukan pembangunan yang seminimal mungkin berdampak negatif terhadap lingkungan dan keanekaragaman tumbuhan maupun satwa di sekitarnya.

Kata kunci: *pengadaan tanah, pembangunan, kepentingan umum, konservasi*

Abstract

Massive infrastructure development is being intensively carried out by the Indonesian government. The need for land for these infrastructure projects is increasing along with the series of problems that follow. Disputes over land ownership, community rejection of development plans, and development that passes through conservation areas are some of the problems that often occur in the constraints of land preparation for infrastructure development. The formulations of the problems in this research are how is the legal protection of conservation areas for land acquisition for development in the public interest? and what is the land acquisition mechanism for development in the public interest, especially above conservation areas? This legal research is carried out through a normative juridical approach, which is descriptive analytical in nature and only literature or secondary data is examined. Secondary data in this study were obtained through library research (library research). Public interest development can be carried out on a limited basis with a borrow-to-use permit if it meets the terms and conditions and fulfills the elements of strategic activities as regulated in the law, and carries out development that has a minimal negative impact on the environment and the diversity of plants and animals around it.

Keywords: *land acquisition, development, public interest, conservation*